PERAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM EFEKTIVITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Aditya Kurniawan Ginting
NPP. 33.0798
Asdaf Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Program Studi Keuangan Publik
Email: adiityaakr@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Anindita Primastuti S.E., M.E.
Email: anindita@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Regional development planning through the Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) in Samarinda City still faces a gap between high community participation and the low level of proposal accommodation into the Regional Budget (APBD). This condition indicates an imbalance between community aspirations and the fiscal capacity as well as budgeting mechanisms of the local government. Therefore, the effectiveness of Musrenbang in supporting the Pro-Bebaya Program requires further analysis.* ***Purpose:*** *This study aims to examine the role of Musrenbang in improving the effectiveness of the Pro-Bebaya program in relation to regional planning and budgeting in the City of Samarinda.* ***Method:*** *This research uses a descriptive qualitative approach with a post-positivist paradigm. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman (2014) model. The study is based on the theories of Mardiasmo (2018) and Todd Litman (2020).* ***Result:*** *The results show that Musrenbang and Pro-Bebaya have been implemented effectively across several dimensions, indicated by the comprehensive nature of community proposals, increased inclusive participation, information transparency, and planning integration through the SIPD system. The fixed budget allocation of IDR 100 million per RT provides budget certainty and strengthens equitable development distribution. Physical outputs such as road paving, drainage systems, and social facilities have been successfully realized, while outcomes indicate increased community satisfaction and self-reliance. However, challenges remain in administrative efficiency and the optimization of post-planning feedback mechanisms.* ***Conclusion:*** *Musrenbang within the Pro-Bebaya context in Samarinda City is generally effective in improving community-based planning and budgeting quality. However, it still requires strengthening in administrative efficiency and communication systems to ensure more optimal and sustainable implementation.*

Keywords: *Effectiveness, Planning and Budgeting, Pro-Bebaya, Musrenbang, Samarinda City.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perencanaan pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Samarinda masih menghadapi kesenjangan antara tingginya partisipasi masyarakat dan rendahnya tingkat akomodasi usulan ke dalam APBD. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara aspirasi masyarakat dengan kapasitas fiskal dan mekanisme penganggaran daerah, sehingga efektivitas Musrenbang dalam mendukung Program Pro-Bebaya masih perlu dianalisis lebih lanjut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Musrenbang dalam meningkatkan efektivitas Pro-Bebaya dengan perencanaan dan penganggaran daerah di Kota Samarinda. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma *post-positivisme*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (2014). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Mardiasmo (2018) dan Todd Litman (2020). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang dan Pro-Bebaya telah berjalan efektif pada berbagai dimensi, ditandai dengan komprehensifnya usulan masyarakat, peningkatan partisipasi inklusif, keterbukaan informasi, serta integrasi perencanaan melalui SIPD. Target anggaran Rp100 juta per RT mampu memberikan kepastian pendanaan dan memperkuat pemerataan pembangunan. Output berupa semenisasi jalan, drainase, dan fasilitas sosial berhasil direalisasikan, sementara outcome menunjukkan peningkatan kepuasan dan kemandirian masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kendala pada efisiensi administratif dan optimalisasi umpan balik masyarakat. **Kesimpulan:** Musrenbang dalam konteks Pro-Bebaya di Kota Samarinda secara umum telah efektif dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah berbasis masyarakat, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek efisiensi dan sistem komunikasi pasca-perencanaan agar lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, Kota Samarinda, Musrenbang, Perencanaan dan Penganggaran, Pro-Bebaya.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Prihatini & Sutikno, 2023). Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan dan mengelola anggaran sesuai kebutuhan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, pemerintah mengembangkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai

forum partisipatif yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah (Daraba & Faisal, 2023). Melalui mekanisme tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Sinurat & Panjaitan, 2017).

Musrenbang memiliki posisi penting dalam siklus pembangunan daerah karena menjadi tahapan awal yang menghubungkan proses perencanaan dengan penganggaran (Affandi et al., 2022; Musadat, 2023). Hasil Musrenbang digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Saragih et al., 2024). Dengan demikian, efektivitas Musrenbang tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana usulan yang dihasilkan mampu memengaruhi kebijakan pembangunan dan terakomodasi dalam penganggaran daerah (Primastuti & Li, 2018). Bahwa penganggaran publik merupakan proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan sehingga sering kali terjadi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat yang diusulkan melalui mekanisme partisipatif dengan prioritas anggaran yang ditetapkan pemerintah dan legislatif (Rubin, 2019; Toham et al, 2021).

Dalam konteks Kota Samarinda, pelaksanaan perencanaan partisipatif diperkuat melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya). Program yang diluncurkan Pemerintah Kota Samarinda ini merupakan inovasi pembangunan berbasis masyarakat yang memberikan alokasi dana sebesar Rp100 juta per tahun kepada setiap Rukun Tetangga (RT) untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pro-Bebaya dirancang sebagai instrumen pembangunan partisipatif yang mengutamakan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput serta mendorong pemerataan pembangunan wilayah. Dalam implementasinya, berbagai program yang dibiayai melalui Pro-Bebaya bersumber dari kebutuhan dan usulan masyarakat yang dihimpun melalui forum Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan Musrenbang akan sangat menentukan ketepatan sasaran pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran, serta keberhasilan pelaksanaan Program Pro-Bebaya.

Meskipun secara normatif Musrenbang dan Pro-Bebaya dirancang untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran daerah sering kali masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan serta keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat (Damayanti et al., 2025). Kondisi tersebut menyebabkan aspirasi masyarakat tidak selalu memperoleh ruang yang proporsional dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Akibatnya, perencanaan partisipatif yang ideal sering kali belum mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fenomena tersebut juga terlihat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kota Samarinda. Data Musrenbang Kota Samarinda Tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah usulan pembangunan yang masuk mencapai 8.845 usulan, yang terdiri atas 4.985 usulan masyarakat melalui Pro-Bebaya, 2.128 usulan perangkat daerah, 1.471 pokok pikiran DPRD, serta 261 usulan hibah dan bantuan sosial.

Tingginya jumlah usulan tersebut menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Namun demikian, tingginya partisipasi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat akomodasi usulan ke dalam kebijakan penganggaran daerah. Hal ini sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Data Usulan Musrenbang yang Terealisasi di Kota Samarinda Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Usulan Musrenbang	Usulan Terakomodasi dalam APBD	Persentase Realisasi
2019	3.245	1.238	38,1%
2020	3.412	1.277	37,4%
2021	3.560	1.298	36,5%
2022	3.725	1.332	35,7%
2023	3.910	1.348	34,5%

Sumber: Bappeda Kota Samarinda, Laporan Evaluasi Musrenbang 2019–2023

Berdasarkan Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda diatas, ditunjukkan bahwa selama periode 2019–2023 hanya sekitar 34–38 persen usulan Musrenbang yang dapat diakomodasi ke dalam APBD. Persentase realisasi tersebut mengalami tren penurunan dari 38,1 persen pada tahun 2019 menjadi 34,5 persen pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan. Keterbatasan fiskal daerah, dominasi belanja rutin, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, serta adanya prioritas pembangunan lain menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat realisasi usulan masyarakat. Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas Musrenbang tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan sistem perencanaan dan penganggaran daerah dalam mengintegrasikan hasil Musrenbang ke dalam kebijakan pembangunan. Jika sebagian besar usulan masyarakat tidak dapat direalisasikan, maka Musrenbang berpotensi dipandang hanya sebagai formalitas administratif yang belum mampu menghasilkan dampak nyata terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap peran Musrenbang dalam menjembatani hubungan antara proses perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Program Pro-Bebaya sebagai inovasi pembangunan partisipatif Kota Samarinda.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Imtihan (2017) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tingkat desa masih didominasi pemerintah dan belum mencapai tingkat kemitraan yang ideal (Imtihan, 2017). Bahwa integrasi hasil Musrenbang ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah masih belum optimal akibat keterbatasan fiskal dan lemahnya sinkronisasi kebijakan pembangunan. Namun demikian, kedua penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek prosedural dan partisipatif, serta belum secara khusus mengkaji efektivitas Musrenbang dalam mendukung inovasi pembangunan daerah melalui program berbasis masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai bagaimana peran Musrenbang dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya dalam konteks implementasi Program Pro-Bebaya di Kota Samarinda. Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya menelaah aspek partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara hasil Musrenbang, efektivitas perencanaan daerah, efektivitas penganggaran daerah, dan implementasi Pro-Bebaya sebagai program unggulan Pemerintah Kota Samarinda. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kota Samarinda".

1.2. Kesenjangan Penelitian yang Diambil (Research Gap)

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Samarinda memiliki peran strategis sebagai instrumen perencanaan partisipatif yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah. Namun, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda periode 2019–2023, hanya sekitar 34–38 persen usulan Musrenbang yang dapat diakomodasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, data Musrenbang Tahun 2025 menunjukkan bahwa dari total 8.845 usulan pembangunan yang berasal dari masyarakat, perangkat daerah, pokok pikiran DPRD, serta hibah dan bantuan sosial, tidak seluruhnya dapat direalisasikan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan hasil perencanaan ke dalam kebijakan penganggaran. Fenomena ini mengindikasikan bahwa efektivitas Musrenbang tidak hanya ditentukan oleh tingginya tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan sistem perencanaan dan penganggaran daerah dalam menerjemahkan usulan masyarakat menjadi program pembangunan yang nyata. Di sisi lain, Pemerintah Kota Samarinda telah mengembangkan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya) sebagai inovasi pembangunan berbasis masyarakat. Namun demikian, keterkaitan antara pelaksanaan Musrenbang, efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah, serta implementasi Pro-Bebaya masih belum banyak dikaji secara akademis.

Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek partisipasi masyarakat, responsivitas pemerintah daerah, hambatan administratif, maupun keterbatasan fiskal dalam pelaksanaan Musrenbang. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis peran Musrenbang dalam efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah dengan mengaitkannya pada implementasi Program Pro-Bebaya sebagai inovasi pembangunan partisipatif Kota Samarinda masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana Musrenbang berperan dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah serta mendukung pelaksanaan Program Pro-Bebaya di Kota Samarinda.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena Kota Samarinda memiliki Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya) sebagai inovasi pembangunan berbasis masyarakat yang menempatkan partisipasi warga sebagai salah satu unsur utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan Program Pro-Bebaya sangat dipengaruhi oleh kualitas proses Musrenbang sebagai wadah penjaringan aspirasi masyarakat. Apabila proses Musrenbang belum berjalan secara efektif, maka terdapat risiko ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan daerah, dan alokasi anggaran yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menjelaskan sejauh mana Musrenbang berperan dalam mendukung efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya dalam menunjang pelaksanaan Pro-Bebaya di Kota Samarinda.

Dari sisi keilmuan, penelitian ini memiliki urgensi karena masih terbatasnya kajian yang menghubungkan efektivitas Musrenbang dengan implementasi program pembangunan partisipatif daerah. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat, hambatan pelaksanaan Musrenbang, atau keterbatasan fiskal daerah secara terpisah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis keterkaitan antara Musrenbang, efektivitas perencanaan daerah, efektivitas penganggaran daerah, dan implementasi Pro-Bebaya sebagai inovasi pembangunan lokal masih relatif sedikit. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian perencanaan pembangunan partisipatif, penganggaran daerah, serta tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada prinsip partisipasi, efektivitas, dan akuntabilitas. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Musrenbang. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat sinkronisasi antara aspirasi masyarakat, dokumen perencanaan pembangunan, dan kebijakan penganggaran daerah sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), partisipasi masyarakat, serta efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah. Penelitian Salahudin, Zumitzavan, Nurmandi, dan Sulistyaningsih (2019) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang relatif tinggi, namun sebagian besar usulan masyarakat belum mampu terakomodasi dalam APBD akibat keterbatasan fiskal dan dinamika politik penganggaran. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai responsivitas pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat, tetapi belum mengkaji hubungan antara Musrenbang dengan implementasi program pembangunan berbasis masyarakat seperti Pro-Bebaya di Kota Samarinda. Selanjutnya, penelitian Muluk, Danar, dan Rahmawati (2020) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan

akuntabilitas dan responsivitas kebijakan pembangunan daerah. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada proses penyusunan dokumen perencanaan daerah dan belum menempatkan Musrenbang sebagai instrumen formal yang menghubungkan partisipasi masyarakat dengan proses penganggaran daerah. Dengan demikian, hubungan antara hasil Musrenbang dan realisasi anggaran masih belum dianalisis secara mendalam.

Penelitian Hasanah dkk. (2025) menemukan bahwa efektivitas Musrenbang dipengaruhi oleh berbagai hambatan administratif, keterbatasan sumber daya manusia, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas organisasi dalam mendukung perencanaan partisipatif. Namun demikian, penelitian ini belum mengaitkan efektivitas Musrenbang dengan kondisi fiskal daerah maupun dimensi efektivitas perencanaan dan penganggaran secara komprehensif. Sementara itu, Fauziah, Sujianto, dan Adianto (2024) mengungkapkan bahwa banyak usulan prioritas masyarakat dalam Musrenbang tingkat kecamatan tidak dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran daerah. Penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Akan tetapi, kajiannya masih terbatas pada tingkat kecamatan dan belum menganalisis keterkaitan antara hasil Musrenbang, integrasi antar perangkat daerah, serta kebijakan fiskal pada tingkat kota secara menyeluruh. Selain itu, penelitian Muhammad Fitrah, Budiman, dan Muhammad Reza Fahlevy (2024) mengenai implementasi Program Pro-Bebaya di Kota Samarinda menunjukkan bahwa program tersebut mampu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui alokasi dana pembangunan sebesar Rp100 juta per RT. Namun, penelitian tersebut menemukan kecenderungan dominasi usulan pembangunan fisik dibandingkan program pemberdayaan masyarakat. Meskipun memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Pro-Bebaya, penelitian tersebut belum menganalisis keterkaitan antara Pro-Bebaya dan Musrenbang sebagai mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai Musrenbang masih banyak berfokus pada aspek partisipasi masyarakat, hambatan pelaksanaan, dan keterbatasan fiskal daerah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis peran Musrenbang dalam efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah dengan mengaitkannya pada implementasi Program Pro-Bebaya di Kota Samarinda masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana Musrenbang berperan dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah serta mendukung pelaksanaan Program Pro-Bebaya sebagai inovasi pembangunan partisipatif di Kota Samarinda.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu, baik dari aspek konteks penelitian, fokus kajian, maupun pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya umumnya lebih banyak membahas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari perspektif partisipasi masyarakat, responsivitas pemerintah daerah, hambatan administratif, serta keterbatasan fiskal dalam proses perencanaan pembangunan.

Selain itu, sebagian penelitian hanya berfokus pada efektivitas Musrenbang di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan proses penganggaran daerah dan implementasi program pembangunan berbasis masyarakat. Sementara itu, penelitian ini secara khusus meneliti peran Musrenbang dalam efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah di Kota Samarinda dengan mengaitkannya pada implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya) sebagai program unggulan pemerintah daerah.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada fokus kajian yang tidak hanya menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang, tetapi menganalisis bagaimana hasil Musrenbang dapat memengaruhi efektivitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penganggaran yang tertuang dalam APBD. Penelitian ini menyoroti keterkaitan antara aspirasi masyarakat, proses perencanaan pembangunan, kebijakan penganggaran daerah, serta implementasi Pro-Bebaya sebagai instrumen pembangunan partisipatif yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT). Pendekatan tersebut masih relatif jarang ditemukan dalam penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji Musrenbang dan Pro-Bebaya secara terpisah.

Dari sisi teoritis, penelitian ini menggunakan teori Efektivitas dari Todd Litman (2020) sebagai teori utama dan teori Efektivitas Anggaran dari Mardiasmo (2018) sebagai teori pendukung. Penggunaan kedua teori tersebut diarahkan untuk menganalisis sejauh mana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mampu menjalankan fungsinya secara efektif dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan proses perencanaan dan penganggaran daerah Melalui integrasi kedua perspektif tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas proses Musrenbang sebagai forum partisipatif, tetapi juga efektivitas hasilnya dalam memengaruhi kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian efektivitas perencanaan dan penganggaran partisipatif serta menjadi referensi bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan kualitas Musrenbang dan optimalisasi pelaksanaan Program Pro-Bebaya sebagai instrumen pembangunan berbasis masyarakat.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Musrenbang dalam meningkatkan efektivitas Pro-Bebaya dengan perencanaan dan penganggaran daerah di Kota Samarinda.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma *post-positivisme* untuk menganalisis peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah di Kota Samarinda. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses Musrenbang, integrasi hasil perencanaan ke dalam APBD, serta keterkaitannya dengan implementasi Program Pro-Bebaya (Simangunsong, 2017). Penelitian ini berlandaskan teori Efektivitas Todd Litman (2020) dan Efektivitas Anggaran

Mardiasmo (2018) yang dioperasionalisasikan ke dalam 10 indikator utama sebagai kerangka analisis dalam menilai efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder (Simangunsong, 2017). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih menggunakan *purposive sampling*, yaitu pejabat Bapperida Kota Samarinda, anggota TAPD, OPD terkait, serta perwakilan masyarakat seperti ketua RT dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang dan Pro-Bebaya. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti RKPD, RPJMD, APBD, LRA, laporan Musrenbang, serta literatur ilmiah pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk menjaga keabsahan data.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi secara interaktif. Penelitian ini juga menggunakan teknik *member check* untuk memastikan kesesuaian data dan interpretasi peneliti dengan informan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas Musrenbang dalam mendukung perencanaan dan penganggaran daerah serta implementasi Program Pro-Bebaya di Kota Samarinda. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan selama 20 hari yakni mulai tanggal 5–24 Januari 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dimensi Komprehensif

Pada dimensi komprehensif (*comprehensive*), hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang melalui Program Pro-Bebaya di Kota Samarinda telah mampu mengakomodasi berbagai jenis kebutuhan masyarakat secara lintas sektor. Data tahun 2025 menunjukkan terdapat 4.985 usulan masyarakat yang mencakup kebutuhan infrastruktur, ekonomi, hingga pemberdayaan sosial, yang menunjukkan tingginya cakupan aspirasi yang dihimpun dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan tidak hanya berfokus pada satu sektor, tetapi mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan secara menyeluruh.

Hal tersebut diperkuat melalui wawancara dengan Camat Sungai Kunjang, Bapak Dili Satria Handoko, S.STP., M.M. yang menyatakan bahwa: “Penentuan prioritas tidak dilakukan secara acak. Kami merujuk pada SPPN 2004 di mana perencanaan harus berkesesuaian dengan RPJMD dan Renstra OPD. Pro-Bebaya memungkinkan kami menyentuh kebutuhan mikro yang sering luput dari radar dinas teknis, namun sangat berdampak pada kesejahteraan lingkungan RT.” Senada dengan itu, Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Hj. Mustika Retno Andrita, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa “usulan masyarakat dikelompokkan ke dalam bidang infrastruktur, ekonomi, dan sosial budaya untuk memastikan sinkronisasi dengan RKPD dan RPJMD.” Data observasi juga menunjukkan bahwa usulan Pro-Bebaya didominasi oleh kebutuhan sarana prasarana sebesar 60% dan pemberdayaan masyarakat sebesar 40%, serta seluruh proses penyusunan telah merujuk pada RPJMD Kota Samarinda 2021–2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip komprehensif

telah terpenuhi karena Musrenbang dan Pro-Bebaya mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, baik fisik maupun nonfisik, serta terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah yang berlaku.

3.2. Dimensi Efisiensi

Pada dimensi efisien (*efficient*), hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang melalui Program Pro-Bebaya di Kota Samarinda telah berjalan cukup efisien terutama dalam aspek ketepatan waktu dan mekanisme penyaluran anggaran. Dana sebesar Rp100 juta per RT menjadi instrumen yang mempercepat distribusi pembangunan karena mampu memangkas rantai birokrasi usulan kecil ke tingkat perangkat daerah yang lebih tinggi.

Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan perwakilan Pokok Masyarakat, Bapak Hendra, S.Sos., pada 14 Januari 2026 yang menyatakan bahwa: “Pelaksanaan secara umum berjalan tepat waktu sesuai jadwal pemerintah kota. Namun, kendala efisiensi muncul pada melengkapi kriteria usulan dari warga, sehingga penyusunan proposal sering memakan waktu lebih lama.” Selain itu, berdasarkan Juknis Musrenbang RKPD Tahun 2025, proses efisiensi masih dipengaruhi oleh ketentuan kriteria usulan prioritas yang harus dipenuhi secara administratif. Dengan demikian, dimensi efisiensi telah tercapai pada aspek ketepatan waktu dan pemerataan anggaran, namun masih menghadapi kendala teknis pada proses administrasi usulan di tingkat masyarakat.

3.3. Dimensi Inklusif

Pada dimensi inklusif (*inclusive*), hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang melalui Program Pro-Bebaya di Kota Samarinda telah meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat secara signifikan dalam proses perencanaan pembangunan. Mekanisme Rembuk Warga di tingkat RT menjadi ruang utama bagi seluruh kelompok masyarakat untuk terlibat sejak awal pengusulan, termasuk pemuda, perempuan/Dasawisma, pelaku UMKM, hingga kelompok rentan, sebelum dibawa ke jenjang forum yang lebih tinggi. Hal ini tercermin dari pelaksanaan Musrenbang Kota Samarinda Tahun 2025 yang menekankan keterlibatan berbasis komunitas. Berikut disajikan dokumentasi pelaksanaan Musrenbang di Kota Samarainda sebagaimana dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Gambar 3.1
Rapat Musrenbang Kota Samarinda Tahun 2025

Hal tersebut diperkuat melalui wawancara dengan Camat Sungai Kunjang, Bapak Dili Satria Handoko S.STP., M.M. (10 Januari 2026) yang menyatakan: "Partisipasi masyarakat sangat dinamis. Kami melibatkan unsur pemuda, perempuan/Dasawisma, kelompok rentan, hingga pelaku UMKM. Rembuk warga menjadi arena di mana suara terkecil sekalipun didengarkan…". Senada dengan itu, Ketua Pokok Masyarakat, Bapak Hendra, S.Sos, menjelaskan bahwa: "Kami menggunakan sistem ranking prioritas, mengecek kondisi nyata, mengukur volume jalan, dan menyusun RAB bersama warga". Kondisi ini menunjukkan bahwa Pro-Bebaya telah membuka ruang demokrasi partisipatif yang inklusif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

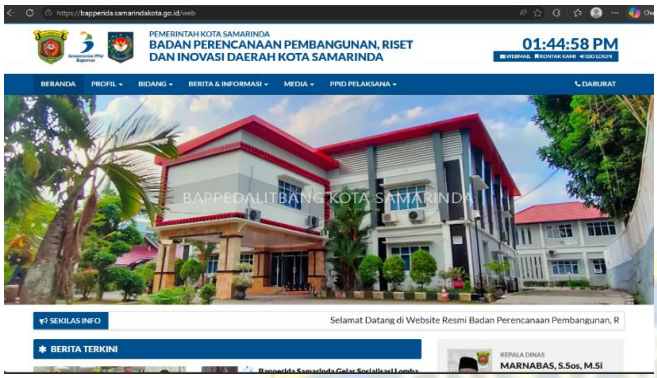
3.4. Dimensi Informatif

Pada dimensi informatif (*informative*), hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang melalui Program Pro-Bebaya di Kota Samarinda telah berjalan dengan prinsip keterbukaan informasi yang menekankan pemahaman masyarakat terhadap alasan di balik setiap keputusan perencanaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadinya kesalahpahaman maupun konflik dalam proses penetapan prioritas pembangunan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengusul, tetapi juga sebagai pihak yang memahami rasionalitas keputusan yang diambil pemerintah.

Hal tersebut diperkuat melalui wawancara dengan Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Hj. Mustika Retno Andrita, S.E., M.Si. (8 Januari 2026) yang menyatakan bahwa: "Kami sangat menekankan transparansi alasan rasional. Masyarakat perlu tahu mengapa usulannya diterima, ditunda, atau ditolak. Dalam rapat, kami bahas mana yang lebih mendesak dan mana yang bisa ditunda sesuai kapasitas fiskal kota". Senada dengan itu, Ketua Pokok Masyarakat, Bapak Hendra, S.Sos (13 Januari 2026) menjelaskan bahwa: "Saat dana turun, kami panggil warga lagi untuk memberitahu usulan mana yang diterima A, B, atau C. Jika anggaran tidak cukup untuk semua usulan, maka yang lain ditunda agar warga tahu alasannya". Selain itu, aspek keterbukaan informasi juga diperkuat melalui publikasi RKPD oleh Dinas Kominfo yang diunggah pada website resmi pemerintah serta pembacaan notulen dan berita acara yang disaksikan dan ditandatangani warga di tingkat RT. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi informatif telah berjalan dengan baik melalui transparansi kebijakan dan komunikasi dua arah yang mudah dipahami masyarakat.

3.5. Dimensi Terintegrasi

Pada dimensi terintegrasi (*integrated*), hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang melalui Program Pro-Bebaya di Kota Samarinda telah berjalan dengan sistem perencanaan yang saling terhubung antar dokumen perencanaan pembangunan daerah. Integrasi ini mencakup keterkaitan antara Musrenbang, Renja SKPD, RKPD, dan APBD yang diselaraskan untuk memastikan kesesuaian dengan visi pembangunan daerah. Proses sinkronisasi tersebut dilakukan melalui sistem digital pemerintah sehingga seluruh usulan dapat terakomodasi secara sistematis dan terukur. Adapun sinkronisasi yakni melalui website Bapperida sebagaimana dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber: Portal Website Bapperida Kota Samarinda

Gambar 3.2

Tampilan Website Bapperida

Hal tersebut diperkuat melalui wawancara dengan Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Hj. Mustika Retno Andrita, S.E., M.Si. (8 Januari 2026) yang menyatakan bahwa: "Sinkronisasi perencanaan dilakukan melalui SIPD. RKPD ditarik dari RPJMD, sementara Renja SKPD ditarik dari Renstra. Keduanya harus seiring sejalan meskipun ada jeda waktu penetapan". Selain itu, didukung oleh data observasi yang menunjukkan bahwa perencanaan Pro-Bebaya telah terhubung dengan sistem informasi digital pemerintah seperti SIPD dan BAPPERIDA Kota Samarinda. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi terintegrasi telah berjalan dengan baik karena seluruh proses perencanaan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berbasis digital.

3.6. Dimensi Logis

Pada dimensi logis (*logical*), hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang melalui Program Pro-Bebaya di Kota Samarinda telah menerapkan prinsip konsistensi dan objektivitas dalam proses seleksi serta penentuan skala prioritas usulan masyarakat. Perencanaan dianggap logis apabila didasarkan pada indikator teknis yang jelas, seperti tingkat urgensi permasalahan, jumlah penerima manfaat, serta kesesuaian dengan 10 Program Unggulan Wali Kota, sehingga tidak bergantung pada subjektivitas maupun kedekatan tertentu.

Hal tersebut diperkuat melalui wawancara dengan Camat Sungai Kunjang, Bapak Dili Satria Handoko S.STP., M.M. (10 Januari 2026) yang menyatakan bahwa: "Kami menerapkan skoring terhadap usulan yang masuk. Prioritas utama dialokasikan untuk penanganan masalah krusial wilayah, seperti titik banjir yang parah atau perbaikan jalan lingkungan yang padat penduduk. Delegasi masyarakat juga diberikan pemahaman logis mengenai batasan anggaran daerah". Senada dengan itu, Kepala RT Bapak Asep (13 Januari 2026) menjelaskan bahwa: "Biasanya sebelum pengajuan Pro-Bebaya, warga dikumpulkan untuk rapat. Kami jelaskan aturannya, lalu mereka mengusulkan apa saja, semua warga boleh bicara". Selain itu, setiap usulan yang ditunda atau ditolak wajib dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penentuan prioritas telah berjalan secara objektif,

sistematis, dan berbasis kriteria teknis yang jelas sehingga meminimalisir unsur subjektivitas dalam proses perencanaan pembangunan.

3.7. Dimensi Transparan

Pada dimensi transparan (*transparent*), hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang melalui Program Pro-Bebaya di Kota Samarinda telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik, khususnya dalam penyampaian pagu indikatif wilayah sebelum proses Musrenbang dimulai serta penyebarluasan hasil keputusan akhir kepada masyarakat. Transparansi ini penting agar masyarakat dapat memahami batasan anggaran secara rasional dan menyesuaikan usulan pembangunan sesuai kapasitas fiskal daerah.

Pelaksanaan Musrenbang di Kota Samarinda juga telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat kecamatan, lurah, tokoh masyarakat, LPM, hingga perwakilan RT dan Pokmas. Informasi mengenai pagu indikatif disampaikan secara terbuka pada awal forum sehingga menjadi acuan dalam penyusunan prioritas usulan. Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan Kepala RT, Bapak Asep (13 Januari 2026) yang menyatakan: "Dalam forum Musrenbang, pihak pemerintah daerah secara terbuka memaparkan berapa pagu anggaran yang bisa dialokasikan untuk wilayah kami. Setelah disepakati bersama, draf usulan prioritas langsung dibacakan kembali sebelum penandatanganan berita acara". Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme umpan balik kepada masyarakat yang tidak hadir secara langsung masih perlu dioptimalkan agar informasi hasil Musrenbang dapat tersampaikan secara lebih luas dan merata. Berdasarkan Tabel 4.6, indikator aksesibilitas data dan akuntabilitas forum telah terpenuhi melalui publikasi RKPD pada website resmi pemerintah serta penandatanganan berita acara oleh perwakilan masyarakat.

3.8. Dimensi Target Anggaran

Pada dimensi target anggaran (*budget target*), hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang melalui Program Pro-Bebaya di Kota Samarinda telah menerapkan prinsip penetapan target anggaran yang jelas, pasti, dan terukur, yaitu sebesar Rp100 juta per RT setiap tahun. Kepastian target ini menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan di tingkat akar rumput karena memberikan jaminan pendanaan yang sebelumnya tidak tersedia secara pasti dalam mekanisme Musrenbang konvensional.

Kepastian target anggaran tersebut terbukti mampu mengurangi ketidakpastian dalam proses seleksi usulan masyarakat. Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan RT Kelurahan Temindung Permai, Bapak Asep (13 Januari 2026) yang menyatakan bahwa: "Kalau dulu di Musrenbang kelurahan, kami harus berebut dengan 39 RT lainnya. Paling hanya 10 usulan yang diterima, sisanya dianggap bukan prioritas dan gugur. Sekarang dengan Pro-Bebaya, meskipun dananya dipatok 100 juta, targetnya jelas bahwa setiap RT dapat bagian rata untuk membangun wilayahnya". Pernyataan ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pola distribusi anggaran dari sistem kompetitif menjadi sistem berbasis alokasi tetap per wilayah.

Dari sisi capaian kinerja anggaran daerah, data menunjukkan bahwa usulan Musrenbang di Kota Samarinda periode 2019–2025 mengalami peningkatan jumlah, yaitu dari 3.245 usulan pada tahun 2019 menjadi 4.110 usulan pada tahun 2025. Namun, tingkat realisasi usulan dalam APBD relatif stabil pada kisaran 34–38%, yang menunjukkan adanya keterbatasan pada sistem konvensional sebelum penguatan skema Pro-Bebaya. Dengan adanya program ini, sebagian kebutuhan masyarakat dapat langsung ditangani di tingkat RT tanpa harus bersaing pada tingkat kelurahan dan kecamatan. Selain itu, data anggaran Pemerintah Kota Samarinda tahun 2024 menunjukkan bahwa Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencapai Rp1.464.582.915.419,00 dengan realisasi sebesar Rp1.415.682.927.225,00 atau 96,66%. Realisasi ini menunjukkan efektivitas penyerapan anggaran yang tinggi serta adanya kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah.

Dalam implementasinya, setiap RT melalui Pokmas menyusun RAB sesuai kebutuhan riil masyarakat. Berdasarkan observasi pada RAB RT.010, RT.011, dan RT.012, penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, pengadaan tenda, dan CCTV. Pola ini menunjukkan bahwa target anggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga operasional dan langsung menyentuh kebutuhan warga. Dengan demikian, dimensi target anggaran dapat dinilai efektif karena memberikan kepastian alokasi dana, meningkatkan keadilan distribusi anggaran, serta memperkuat kemampuan RT dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara mandiri dan terukur setiap tahun.

3.9. Dimensi *Output* (Hasil Fisik)

Pada dimensi *output* (hasil fisik), hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang melalui Program Pro-Bebaya di Kota Samarinda telah menghasilkan output nyata berupa pembangunan fisik lingkungan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Output tersebut terutama berupa semenisasi gang kecil dengan lebar 1,5–2 meter serta pembangunan drainase lingkungan yang sebelumnya tidak terjangkau oleh anggaran Dinas PUPR. Selain itu, kegiatan pemberdayaan juga menghasilkan pengadaan fasilitas seperti tenda, kursi, serta sarana kegiatan masyarakat lainnya.

Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan Lurah Temindung Permai, Bapak Rizki Mandala Putra, S.H. (12 Januari 2026) yang menyatakan bahwa: “Target output kami bagi menjadi 60% sarpras dan 40% pemberdayaan. Hasilnya sangat memuaskan; gang-gang kecil sudah disemenisasi dan jalan lingkungan yang dulu gelap kini terang karena pengadaan lampu jalan yang diusulkan langsung oleh warga. Kualitasnya juga bagus karena ada pendamping yang mengarahkan standar teknisnya”. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga didukung oleh pembagian anggaran teknis 60% untuk sarana prasarana dan 40% untuk pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi output telah tercapai secara optimal karena mampu mengubah usulan masyarakat menjadi hasil fisik yang nyata, terukur, dan sesuai standar teknis pembangunan lingkungan.

3.10. Dimensi *Outcome* (Dampak/Manfaat)

Pada dimensi *outcome* (dampak/manfaat), hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang melalui Program Pro-Bebaya di Kota Samarinda telah memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Outcome tidak hanya dilihat dari keberhasilan fisik pembangunan, tetapi juga dari manfaat jangka panjang yang dirasakan langsung oleh warga dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan dan penguatan solidaritas sosial. Dampak yang paling dirasakan masyarakat antara lain meningkatnya kemandirian warga dalam mengelola fasilitas sosial di tingkat RT, seperti tersedianya tenda dan kursi rukun kematian yang memudahkan pelaksanaan kegiatan sosial tanpa harus menyewa dari luar. Selain itu, perbaikan infrastruktur melalui semenisasi jalan, pembangunan drainase, serta pengadaan lampu penerangan jalan juga memberikan kenyamanan dalam mobilitas warga, mengurangi genangan air, serta meningkatkan keamanan lingkungan pada malam hari. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan signifikan pada kualitas hidup masyarakat di tingkat RT.

Hal tersebut diperkuat melalui wawancara dengan Kepala RT Kelurahan Temindung Permai, Bapak Asep (13 Januari 2026) yang menyatakan bahwa: “Warga merasa sangat puas karena dampak program ini terasa langsung. Sekarang kalau ada acara atau warga meninggal, kami tidak kelabakan lagi karena tiap RT sudah punya peralatan pendukung sendiri hasil dari Pro-Bebaya. Rasa gotong royong juga meningkat karena warga terlibat langsung dalam pengerjaannya”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa program tidak hanya menghasilkan output fisik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, dimensi *outcome* dinilai efektif karena tercermin dari meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan serta kemudahan akses terhadap fasilitas sosial lingkungan. Secara keseluruhan, hasil analisis menggunakan teori Mardiasmo (2018) menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan dan penganggaran di Kota Samarinda telah berjalan optimal melalui sinergi Musrenbang dan Pro-Bebaya, di mana target anggaran memberikan kepastian pendanaan, output menghasilkan fisik nyata, dan outcome memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

3.11. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang melalui Program Pro-Bebaya di Kota Samarinda secara umum telah berjalan efektif dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis masyarakat melalui sepuluh dimensi utama, yaitu komprehensif, efisiensi, inklusif, informatif, terintegrasi, logis, transparan, target anggaran, output, dan outcome. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Pro-Bebaya dengan alokasi tetap sebesar Rp100 juta per RT telah menjadi faktor penting yang mengubah pola perencanaan dari sistem kompetitif menjadi sistem berbasis pemerataan di tingkat RT. Data penelitian juga menunjukkan bahwa sebanyak 4.110 usulan masyarakat pada tahun 2025 dapat diakomodasi melalui mekanisme *RT-based planning* dengan dominasi kebutuhan sarana prasarana sebesar 60% dan pemberdayaan masyarakat sebesar 40%. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi Musrenbang

dan Pro-Bebaya mampu memperkuat hubungan antara aspirasi masyarakat dan realisasi pembangunan secara lebih langsung dan terukur.

Secara substantif, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan utama sistem perencanaan di Kota Samarinda terletak pada kepastian target anggaran, integrasi sistem digital melalui SIPD, serta meningkatnya partisipasi masyarakat di tingkat RT. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun capaian *output* dan *outcome* menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat tantangan pada aspek efisiensi administratif serta optimalisasi mekanisme umpan balik pasca-Musrenbang. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, koordinasi antar aktor, dan distribusi informasi yang berkelanjutan.

Apabila dikaitkan dengan penelitian terdahulu, temuan penelitian ini secara umum mendukung sekaligus memperluas hasil penelitian Salahudin et al. (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tinggi, namun masih rendah dalam tingkat akomodasi ke APBD. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa melalui Pro-Bebaya, sebagian kebutuhan masyarakat dapat langsung ditangani di tingkat RT tanpa sepenuhnya bergantung pada kompetisi usulan di level kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian, kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan realisasi anggaran menjadi lebih kecil dibandingkan mekanisme Musrenbang konvensional. Selanjutnya, penelitian ini mendukung temuan Muluk et al. (2020) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan responsivitas kebijakan pembangunan daerah. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa partisipasi dalam Pro-Bebaya tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi juga bersifat implementatif karena masyarakat terlibat langsung dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan melalui RAB dan Pokmas di tingkat RT.

Penelitian ini juga sejalan dengan Hasanah et al. (2025) yang menemukan bahwa efektivitas Musrenbang dipengaruhi oleh hambatan administratif dan kapasitas kelembagaan. Temuan ini memperkuat hasil tersebut dengan menunjukkan bahwa hambatan administratif masih muncul terutama dalam penyusunan usulan dan pemenuhan kriteria teknis, meskipun telah didukung sistem digital SIPD. Namun demikian, penelitian ini memperluasnya dengan menunjukkan bahwa hambatan tersebut dapat diimbangi oleh adanya kepastian alokasi anggaran per RT sehingga proses implementasi tetap berjalan. Sementara itu, penelitian Fauziah et al. (2024) yang menyatakan bahwa banyak usulan Musrenbang tidak terealisasi akibat keterbatasan anggaran daerah, berbeda dengan temuan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada adanya skema Pro-Bebaya yang memberikan alokasi tetap Rp100 juta per RT, sehingga sebagian kebutuhan dasar masyarakat dapat ditangani langsung tanpa harus bersaing pada level perencanaan yang lebih tinggi. Dengan demikian, ketimpangan realisasi usulan dapat ditekan melalui pendekatan desentralisasi berbasis komunitas.

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada temuan bahwa efektivitas Musrenbang tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi atau besarnya realisasi anggaran, tetapi juga oleh adanya model alokasi anggaran tetap berbasis RT yang menciptakan perubahan dari sistem kompetitif menjadi sistem distribusi langsung. Model ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal

pada level mikro dapat meningkatkan efektivitas implementasi pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi Musrenbang dan Pro-Bebaya menghasilkan pola perencanaan *hybrid*, di mana masyarakat tidak hanya terlibat dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengawasan program di tingkat lokal.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbang melalui Program Pro-Bebaya di Kota Samarinda secara keseluruhan telah berjalan efektif dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berbasis masyarakat. Berdasarkan teori Litman dan teori Mardiasmo, seluruh dimensi analisis menunjukkan hasil yang relatif positif, mulai dari dimensi komprehensif hingga *outcome*. Program ini mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat secara lintas sektor dengan jumlah 4.110 usulan pada tahun 2025, yang menunjukkan tingginya partisipasi dan luasnya cakupan aspirasi masyarakat. Pada dimensi efisiensi, pelaksanaan program dinilai cukup baik karena adanya kepastian alokasi anggaran sebesar Rp100 juta per RT yang mempercepat proses distribusi pembangunan, meskipun masih terdapat hambatan administratif dalam penyusunan usulan. Pada dimensi inklusif, Pro-Bebaya berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui Rembuk Warga yang melibatkan berbagai kelompok seperti pemuda, perempuan, UMKM, dan kelompok rentan. Sementara itu, pada dimensi informatif dan transparan, program ini telah menerapkan keterbukaan informasi melalui penyampaian pagu indikatif, publikasi RKPD, serta penjelasan langsung hasil keputusan kepada masyarakat.

Pada dimensi terintegrasi dan logis, penelitian menunjukkan bahwa sistem perencanaan telah terhubung dengan SIPD serta didasarkan pada kriteria objektif seperti urgensi dan dampak manfaat. Pada dimensi target anggaran, *output*, dan *outcome*, program ini terbukti efektif karena mampu menghasilkan pembangunan fisik nyata seperti semenisasi jalan dan drainase, serta memberikan dampak sosial berupa meningkatnya kepuasan dan kemandirian masyarakat. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat tantangan pada aspek efisiensi administratif dan mekanisme umpan balik informasi kepada masyarakat yang belum hadir dalam forum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Program Pro-Bebaya telah berhasil meningkatkan efektivitas Musrenbang di Kota Samarinda secara signifikan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek tata kelola administrasi dan distribusi informasi agar manfaatnya lebih optimal, merata, dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu pelaksanaan yang relatif singkat serta keterbatasan akses terhadap data pendukung eksternal, sehingga analisis masih banyak bertumpu pada data internal seperti dokumen Musrenbang, RKPD, dan laporan pelaksanaan Pro-Bebaya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperdalam kajian pada efektivitas implementasi Pro-Bebaya di tingkat mikro, khususnya terkait variasi hasil antar-RT dan kualitas partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian mendatang

juga dapat membandingkan model Musrenbang berbasis RT di Kota Samarinda dengan daerah lain untuk menemukan pola tata kelola perencanaan yang lebih inovatif dan adaptif.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Samarinda, khususnya Bappeda serta perangkat Kecamatan Sungai Kunjang dan para Ketua RT yang telah memberikan izin, dukungan data, serta informasi selama proses penelitian. Terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan, masukan, dan bimbingan yang telah diberikan dalam penyusunan penelitian ini hingga selesai.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Affandi, M. A., Marijan, K., & Windyastuti, D. (2022). Participatory budgeting in Indonesia: From the policy innovation to the democracy innovation. *The Journal of Society and Media*, 6(2), 527–565. https://doi.org/10.26740/jsm.v6n2.p527-565

Damayanti, R. A., Syarifuddin, Madein, A., Alam, A. I. A., & Saudi, N. D. S. (2025). Transforming participatory budgeting through dialogic accounting in Indonesia. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, 12(1), 17–29. https://doi.org/10.18488/74.v12i1.4153

Daraba, D., & Faisal, M. (2023). *Analysis of community participation in development planning in Kalijaga Village, Harjamukti Sub-District, Cirebon City*. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 25*(1), 89–97. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v25i1.34148

Fauziah, F., Sujianto, S., & Adianto, A. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Kelurahan di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, *2*(1), 269–280. https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1791

Fitrah, M., Budiman, Fahlevy, M.R. (2024). Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya) di Kota Samarinda. *Journal of Social and Policy Issues*, 4(1), 19–33. https://doi.org/10.58835/jspi.v4i1.292

Hasanah, A. I., Nasution, A., & Adam. (2025). Effectiveness of the Implementation of the Development Planning Deliberation (Musrenbang) in Medan Helvetia District. *PERSPEKTIF: Journal of Social and Political Science*, 14(1), 150–157. https://doi.org/10.31289/perspektif.v14i1.13463

Imtihan, H. (2017). Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016). *Jurnal Neo-Bis, 11(1), 1–10*. https://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/view/2390

Litman, T. (2013). *Planning principles and practices*. Victoria Transport Policy Institute. http://www.vtpi.org/planning.pdf

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 5)*. Andi Offset.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edisi ke-3). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Muluk, M. R. K., Danar, O. R., & Rahmawati, L. (2020). Community Participation and Development Planning in Local Government Level: A Study on the Formulation of Batu City Medium-Term Development Plan. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 26(3). https://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/view/11145

Musadat, A. (2023). The Effects of Participatory Budgeting on Local Government Service Delivery: Evidence from Sumedang. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 29–60. https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1931031

Prihatini, J., Sutikno, A.N. (2023). Community participation and role in the management of public green open space (RTH) in Cihideung District, Tasikmalaya City, West Java Province. *International Journal of Applied Business and International Management, 8*(3), 422–436. https://doi.org/10.32535/ijabim.v8i3.2658

Primastuti, S. K., & Li, Y. (2018). Evaluating development planning deliberation (the Musrenbang) as a participatory budgeting practice in Indonesia. *City Planning Institute of Japan Research Reports*, 17(2), 223–226. https://doi.org/10.11361/reportscpij.17.2_223

Rubin, Irene S. (2019). *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing (Edisi ke-9).* CQ Press.

Salahudin, S., Zumitzavan, V., Nurmandi, A., Sulistyaningsih, T., & Karinda, K. (2019). The Participatory and Responsiveness of Local Budget Policy in Malang, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 56–72. https://doi.org/10.26618/ojip.v9i1.1720

Saragih, J. R., Purwoko, A., & Purba, T. (2024). Developing participatory planning model to improve regional development planning. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 12(4), 279–302. https://doi.org/10.14246/irspsd.12.4_279

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik, legalistik, empiris, dan inovatif*. Bandung: Alfabeta.

Sinurat, M., & Panjaitan, H. M. (2017). *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah (Cet. 1)*. Bandung: Pustaka Rahmat.

Toham, A., Rustiadi, E., Juanda, B., & Kinseng, R. (2021). Relationship of participative planning, planning alignment and regional development performance: Evidence from Special Region of Yogyakarta. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 1, 137–146. https://doi.org/10.21070/pssh.v1i.18


INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
1956
KEMENTERIAN DALAM NEGERI